

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bahder Johan Nasution, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-5, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Citra Umbara, 1998, *Kamus Hukum*, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ismail Suny, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI dan CV. Sinar Bakti.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Modern*, UII Press, Yogyakarta.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.
- Sirajuddin dan Zulkarnain , 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan Yang Bersih dan Beribawa*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

....., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

....., Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

....., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

....., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

....., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

....., Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.

## C. Karya Ilmiah

Iswandi, *Tesis*, 2010, “ *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Philipus M. Hadjon, 1997,” *Tentang Wewenang*”, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember. Surabaya.